

## Eksistensialisme Jean Paul Sartre (Hukum Islam Sebagai Alat Kontrol Kebebasan Eksistensi Manusia)

A.Afri Taqbir<sup>1</sup>, Jamal Jamil<sup>2</sup>, Musfika Ilyas<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [afritaqbir01@gmail.com](mailto:afritaqbir01@gmail.com)

### Abstrak

Berbicara manusia, tidak terlepas dari persoalan yang inheren dalam dirinya yakni kesadaran dan kebebasannya dalam bereksistensi atau mengada. Jean Paul Sartre adalah salah satu tokoh radikal dalam pemikiran eksistensialisme yang meyakini bahwa manusia adalah kebebasan itu sendiri dan tidak dapat dibatasi oleh tuhan sekalipun. Dasar pemikiran eksistensialisme ialah eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia bukanlah apa-apa sampai ia mengadakan dirinya sebagai mana yang ia kehendaki, Artinya manusia bukanlah makhluk yang kodrat atau esensinya sudah ditentukan, seperti benda-benda. Lanskap pemikiran Sartre dapat kita lihat ketika kebebasan manusia dalam bereksisten itu kemudian saling tumpang tindih hingga meniadakan kebebasan salah-satu diantara mereka. Atas dasar permasalahan demikian, Hukum Islam hadir untuk memberi jawaban terhadap problematika ummat dimana manusia dapat bereksistensi mengaktualkan kebebasannya tanpa menafikan kebebasan diluar dirinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri beberapa literatur-literatur tentang Eksistensialisme terkhusus literature Jean Paul Sartre mengenai Eksistensialisme dan Humanisme.

**Kata Kunci:** Eksistensialisme, Hukum Islam, Jean Paul Sartre, Manusia.

### Abstract

*Human speaking, cannot be separated from the problems inherent in him, namely his awareness and freedom in existence or existence. Jean Paul Sartre is one of the radical figures in existentialism who believes that humans are freedom itself and cannot be limited by even God. The premise of existentialism is that existence precedes essence, which means that humans are nothing until they establish themselves as they wish. This means that humans are not creatures whose nature or essence has been determined, such as things. We can see the landscape of Sartre's thought when human freedom in existence then overlaps with each other to negate the freedom of one of them. On the basis of such problems, Islamic law is here to provide answers to the problems of the ummah where humans can exist and actualize their freedom without denying freedom outside themselves. This type of research is library research, namely research conducted by browsing several literatures on Existentialism, especially Jean Paul Sartre's literature on Existentialism and Humanism.*

*Keywords: Existentialism, Islamic Law, Jean Paul Sartre, Humans I.*

## **A. Pendahuluan**

Berbicara tentang kebebasan manusia sudah tentu akan berurusan dengan tingkah laku perbuatan manusia, dikarenakan manusia dalam berbuat selalu dikaitkan dengan tindakannya dalam memilih dan mengambil keputusan dari kemungkinan-kemungkinan yang dihadapinya beserta tanggung jawabnya. Hal ini pula yang menjadi ciri pembeda antara manusia dengan binatang yang mendasari tindakannya dari naluri dan ransangan-ransangan dari luar. Permasalahan tingkah laku perbuatan manusia selalu berkaitan dengan moral dan etika, etika merupakan masalah utama bagi manusia mengenai tingkah laku perbuatan dalam kehidupan sehari, karena etika adalah nilai sosial yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Manusia mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Pemahaman tentang baik dan buruk ini tidak di dapat dari pengalaman, tetapi telah ada dalam diri manusia sejak dalam kandungan.

Pengertian ini dijelaskan dalam QS Asy-Syams/91:7-8.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۘ

Terjemahan:

“Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya”<sup>1</sup>.

Pemahaman etika atau moralitas itu selalu bertumpu pada suatu agama atau kepercayaan tertentu yang sifatnya indotrinatif, sehingga tidak dapat diterima semua orang dan hanya berfungsi infotmatif dalam rangka mempelajari pikiran-pikiran etis secara historis. Hal demikian dapat mengakibatkan terjadinya legalitas moral atau etika yang menjadi dasar keberperilaku seseorang dalam kehidupan sehari-sehari, disisi lain dengan adanya legalitas tersebut seseorang jadi mempunyai ukuran untuk menghakimi orang lain dalam arti cocok atau tidaknya suatu perbuatan dengan hukum.<sup>2</sup>

Hukum dan moral adalah bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan-searah satu sama lainnya serta satu dalam tujuannya yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, masalah dan sejahtera di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

Legalitas (dari kata Latin, “lex”, hukum) hanya menegaskan kesesuaian lahiria suatu tindakan dengan suatu aturan. Suatu tindakan secara objektif tidak salah, mungkin saja baik dan sesuai

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama, 2019), h. 43.

<sup>2</sup> W. Poespoprodjo, Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik (Pustaka Setia, 2017).

<sup>3</sup> Sanusi, Nur Taufik. “SYARI’AH : ANTARA HUKUM DAN MORAL”. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20, no. 1 (September 13, 2020), h.2.

---

pandangan-pandangan moral, hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat, tetapi secara moral kesesuaian itu belum tentu bisa digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, karena tidak diketahui motivasi atau maksud yang mendasari perbuatan tersebut.<sup>4</sup> Motivasi dan tujuan suatu perbuatan, dengan demikian sangat mempengaruhi moralitas manusia. Orang yang memahami hal ini tidak akan semena-mena dalam menghakimi orang lain, dalam arti cocok atau tidaknya perbuatan seseorang dengan hukum, melainkan pertimbangan berdasarkan motivasinya.

Definisi di atas sesuai dengan pernyataan Ghazaliba bahwa tindakan manusia selalu didasarkan pada moralitas. Dua saham yang berbeda namun dengan harga yang berbeda, maka return dari saham tersebut juga berbeda.<sup>5</sup> Seseorang dapat disebut beretika jika dapat berdiri tegak karena mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Mengetahui apa yang dilakukan seseorang merupakan elemen penting dari tindakan untuk menalar dan mengevaluasi tindakan dengan benar.

Etika yang ditransmisikan dalam Islam adalah etika normatif, yakni etika yang memberikan penilaian positif dan negatif atau benar salah tindakan manusia menurut moralitas.<sup>6</sup> Evaluasi bukan tentang memenuhi kriteria tertentu, tetapi tentang nilai komitmen yang menjadi motivasi atau alasan untuk membuat kriteria tersebut. Penilaian etika normatif tidak netral, tetapi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar kebenaran moral.<sup>7</sup> Di sini Islam juga menjunjung tinggi keharusan suatu tindakan yang dinilai dari motif tindakan seseorang.

Akhlik atau etika Islam akan benar-benar terlaksana dengan baik jika ada rasa benar dan salah di antara manusia atau disebut juga dengan akal budi (moral nurani). Pemahaman sangat penting, karena suatu tindakan adalah moral jika melalui pemikiran rasional yang mandiri, maka tindakan tersebut selalu dilakukan secara sadar, bebas dan tidak dengan paksaan. Dari perspektif filosofis dan Islam, tindakan sadar adalah tindakan yang dapat dinilai dan diperhitungkan secara moral.

Perlu dicatat bahwa etika tidak mempelajari tindakan dalam arti fisik, tetapi dalam arti moral. Apa yang tampak sebagai kondisi belaka dalam anatomi mungkin merupakan prinsip tindakan dalam anatomi moral.<sup>8</sup>

Dilema etika atau tindakan moral ada karena orang bebas, dan kebebasan itu adalah kemampuan orang untuk bertindak untuk diri mereka sendiri. Inilah yang sering disebut

---

<sup>4</sup> Moh Erfan Soebahar, *Manusia Seutuhnya; Suatu Kajian Kritis*, (Semarang: Bimas Jati, 2000)

<sup>5</sup> Sidi Gazaliba, *Sistematika Filsafat, Pengantar Kepada Teori Nilai* (jakarta: Bulan Bintang, n.d.), h.469.

<sup>6</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

<sup>7</sup> Yussafina, "Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia", Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2015)

<sup>8</sup> Poespoprodjo, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik*, h.138.

---

dimensi eksistensi manusia, eksistensi pada sisi eksistensi ini, sehingga manusia dipandang sebagai makhluk terbuka, artinya manusia selalu berusaha menemukan kualitasnya, menemukan kepribadiannya melalui tindakannya berdasarkan pemahaman dan kebebasan mereka.

Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan eksistensi, yaitu tentang cara manusia mengadakan dirinya itu berbeda dengan benda atau hewan.<sup>9</sup> Eksistensialisme sangat menentang objektifitas (cenderung menganggap manusia utama) dan impersonalitas, karena apabila manusia mengingat pembacaan impersonal dan objektif, itu dapat menyebabkan kehidupan yang dangkal dan tidak berguna. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensialis menempatkan nilai yang tinggi pada perlunya kebebasan..

Eksistensialisme membedakan eksistensi dan esensi. Eksistensi merupakan keadaan yang aktual, terjadi dalam ruang dan waktu, yang berarti menunjukkan kepada “suatu benda yang ada disini dan sekarang”. Eksistensi juga berarti bahwa manusia diakui adanya atau hidupnya. Sedangkan esensi adalah sesuatu yang membedakan antara corak suatu benda dengan corak benda lainnya. Esensi menjadikan suatu benda menjadi apa adanya. Maka Jika seseorang memahami gagasan tentang esensi suatu objek, seseorang pasti dapat memikirkannya terlepas dari keberadaannya.

Jean Paul Satre, merupakan salah satu tokoh eksistensialisme yang berasal dari Prancis. Menurut satre, konsep yang berlaku umum bagi para eksistensialis ialah “eksistensi mendahului esensi”. Eksistensi manusia mendahului esensinya berarti menegaskan bahwa manusia bukanlah perwujudan suatu konsepsi tertentu. Bagi satre, manusia tidak mempunyai watak atau corak, dimana watak atau setiap orang memiliki pola ini, yang merupakan konsepsi manusia. Jika terdapat watak atau corak manusia, maka setiap orang merupakan contoh suatu konsepsi manusia universal, akibatnya, semua manusia termasuk penghuni hutan yang tidak beradab, masyarakat biasa, dan orang kaya memiliki definisi dan karakteristik esensial yang sama..<sup>10</sup> Dengan demikian, bagi satre manusia belum bisa di definisikan sebelum bereksistensi, atau mengadakan dirinya sesuai apa di inginkannya. Manusia harus membentuk dirinya terlebih dahulu, baru kemudian dapat diketahui esensinya.

Lebih lanjut lagi, satre mengatakan bahwa “ada” dapat dibagi menjadi dua, diantaranya ialah *l’etre-en-soi* (being-in-itself), yang artinya ada dalam diri yaitu ada sebagai benda, dan *l’etre – pour - soi* (being-for-itself) yang artinya ada untuk diri yaitu ada sebagai kesadaran. Manusia sebagai being-for-itself atau “ada sebagai kesadaran” mempunyai kebebasan untuk

---

<sup>9</sup> K Bertens, *Filsafat Abad Ke XX Prancis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

<sup>10</sup> Jean Paul Satre, *Eksistensialisme Dan Humanisme*, ed. Yudhi Murtanto, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), 36.

membentuk siapa dirinya dengan kehendak dan perbuatannya sendiri. Manusia berusaha untuk menjadi dan memasukkan dirinya dalam rencananya terus-menerus.

Hal ini terjadi karena kesadaran tidak sepenuhnya bertepatan dengan keadaan diri sendiri, oleh karena itu kesadaran tidak sepenuhnya sama dengan keadaan manusia saat ini. Manusia selalu mengatasi keadaannya yang sekarang dan meniadakan segala sesuatu yang kini melatuk pada dirinya, dengan demikian manusia mempunyai kebebasan. Sartre menggambarkan manusia mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam menentukan pilihan atas kebebasannya, dan tak ada dapat mencampurinya.

Sebagaimana kata Sartre yang dikutip oleh Fuad Hasan dalam bukunya, “Human reality is free, basically and completely free”. Bahwa realitas manusia adalah bebas, secara asasi dan sepenuhnya bebas.<sup>11</sup> Kebebasan merupakan hal yang otonom dan mutlak, oleh karena itu manusia harus terus-menerus mengatasi dirinya, dan harus memilih dari kemungkinan-kemungkinan berdasarkan kebebasannya. Manusia sebagai eksistensi yang mendahului esesinya, berarti bahwa manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya, artinya manusia harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan atau pilihan yang telah dia ambil, dan pertanggung jawaban tersebut tidak hanya meliputi individualitas sendiri, akan tetapi mencakup atas semua manusia.

Manusia memilih untuk dirinya sendiri juga berarti memilih untuk semua orang, memilih satu dari beberapa kemungkinan yang ada ialah suatu bentuk penegasan nilai yang manusia akan ambil, karena orang tidak pernah memilih alternatif yang paling buruk. Apa yang dipilih selalu merupakan pilihan terbaik, dan satu-satunya pilihan yang lebih baik bagi seorang individu adalah yang lebih baik bagi sesama manusia.

Sartre percaya bahwa manusia menghadapi tiga kondisi dalam membuat pilihan: depresi, penyangkalan, dan putus asa. Tujuan penyangkalan adalah untuk mengingkari keberadaan Tuhan, karena jika Tuhan tidak ada, tidak akan ada batasan, nilai, atau imperatif moral untuk membenarkan perilaku manusia. Namun, sakramen harga diri manusia tidak akan mengubah apakah Tuhan itu ada atau tidak.<sup>12</sup>

Eksistensialis, menurut Sartre, juga menyangkal keberadaan keinginan dan kekuatan keinginan, karena manusia tidak dapat melihat ke dalam dirinya sendiri untuk dorongan ideal sebagai dasar tindakannya atau mengharapkan ketertiban di luar dirinya. Manusia memilih dirinya sendiri, karena tidak ada hukum moral universal yang dapat menentukan apa yang harus dilakukan, yaitu, manusia bebas. Karena penyangkalan inilah orang menderita, karena

---

<sup>11</sup> Fuad Hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme* (Jakarta Pusat: PT. Dunia Pustaka Jaya, n.d.), h.144.

<sup>12</sup> Hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, h.138.

---

orang memutuskan hidup mereka tidak hanya untuk memilih akan menjadi apa mereka, tetapi untuk menjadi agen yang memutuskan untuk orang dan harus mengambil tanggung jawab penuh dan mendalam.

Putus asa, di sisi lain, adalah membatasi diri anda pada semua yang anda inginkan atau pada semua kemungkinan yang memungkinkan Anda memenuhi tindakan anda. Ini karena orang tidak akan bergantung pada peluang yang tidak terkait erat dengan tindakan mereka.

Karena eksistensialis memulai hidup atau keberadaannya dari ketiadaan menjadi ada, manusia mendesain dirinya sendiri, seorang eksistensialis melihat dirinya sebagai makhluk yang tidak dapat digambarkan. Sebagai mana pernyataan Satre yang kemudian dikutip Muzairi, bahwa manusia bukanlah apa pun kecuali apa diperbuat untuk dirinya sendiri.<sup>13</sup> Manusia mengada sejauh merealisasikan dirinya sendiri, oleh karenanya manusia ialah kumpulan dari tindakannya, dan tiada lain ialah hidupnya sendiri. Manusia sendirilah yang menentukan esensi, serta nilai-nilai moralnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatannya konsisten dengan penelitian lintas budaya dan multidisiplin. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yaitu kumpulan dan pengorganisasian semua kajian yang sesuai dengan pembahasan eksistensialisme. Pembahasan penelitian digabungkan dalam artikel atau artikel penelitian, serta sumber atau hasil diskusi yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian kami menggabungkan semua sumber informasi, tidak hanya informasi dan data, kemudian kami meninjau semuanya yang kesimpulannya studi tentang diskusi tentang pencarian fokus,<sup>14</sup> serta analisis dan penyajian metode yang ditingkatkan, yaitu temuan baru disajikan dalam model eksperimental, meninjau diskursus tentang eksistensialisme Jean-Paul Sartre.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Kebebasan Jean Paul Sartre**

Menurut Sartre, menjadi sadar dan selalu ada menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebebasan. Kebebasan ini mencakup kemampuan untuk memusnahkan,

---

<sup>13</sup> Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Satre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia, 1st ed. (yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), 132.

<sup>14</sup> A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)

yaitu menyingkirkan kondisi saat ini dan memasuki kondisi yang lain. Manusia menciptakan atau membentuk dirinya untuk menemukan esensinya dalam proses menjadi.

Sartre berpendapat bahwa kebebasan dan kewajiban ini terkait erat. Manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya karena ia ada sebelum esensinya, yang mengharuskannya untuk bertindak terus-menerus untuk menjalaninya. Kewajiban ini bukan untuk individualitas seseorang atau untuk diri sendiri, melainkan untuk semua orang.

Eksistensialisme, seperti yang dipraktikkan oleh Sartre, mengakui bahwa orang memiliki kehendak bebas dan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Eksistensialisme erat kaitannya dengan kebebasan karena, jika diperhatikan, pada umumnya manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan ini atau itu. Bagaimana tidak eksistensialisme, yang membahas tentang ciri-ciri khusus dari keberadaan manusia di mana tidak mungkin manusia dapat dipisahkan dari suatu tindakan atau perbuatan selama proses “menjadi”? Manusia hanya bisa eksis atau membangun diri melalui perilaku tersebut. Manusia adalah makhluk yang sadar, maka tindakan adalah mungkin. Manusia akan terus bertindak seperti biasa karena kesadaran ini, yang selalu terpisah dari objek dan bersifat intensional.

Menurut Magnis Suseno, kebebasan adalah tanda dan ekspresi harkat dan martabat manusia, karena kebebasan inilah orang disebut manusia merdeka, membiarkan dirinya memilih dan menentukan jalannya sendiri.<sup>15</sup> Ada kebebasan dalam diri manusia, kebebasan untuk mengembangkan diri dan kebutuhan serta prioritas mereka, ada tanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam kebebasan itu. Pengakuan kebebasan ini sesuai dengan keadaan manusia sebagai manusia yang rasional, karena kebebasan adalah mengetahui kapan manusia dapat memahami dan memenuhi makna dari segala sesuatu yang terkandung dalam kehidupan pribadinya.

---

<sup>15</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, h. 23-26

Ide ini, yang merupakan kebebasan mutlak yang ditemukan dalam eksistensialisme Sartre, termasuk kerugian di samping kebajikan yang telah disebutkan. Karena mereka dipaksa untuk eksis di dunia meskipun tidak menginginkannya, orang memiliki kebebasan penuh. Aktivitas manusia sepenuhnya bebas, terlepas dari alasan atau motif apa pun, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar apa pun sebagai akibat dari kebebasan absolut. Ini karena suatu alasan atau tujuan akan menghalangi orang untuk bebas. Dalam arti kebebasan manusia dibatasi dan tidak mutlak, sebab dan motif juga menjadi pertimbangan manusia dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, adanya kebebasan total menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan manusia tidak terpengaruh oleh apapun.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan kebebasan memilih dan bertindak, tentunya ketika sedang dalam proses pengambilan keputusan, jelas tidak lepas dari keinginan ini atau itu, dan tidak lepas dari alasan atau motif. mendorong mereka untuk memilih. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu. Selain itu, hanya manusia yang dapat, dengan kesadaran dan kehendak bebas, terus-menerus berjuang untuk menciptakan atau menentukan esensi mereka sendiri. Adanya suatu tujuan dalam tindakan juga harus memiliki alasan yang menyertainya, tetapi de Sartre ini disangkal dengan alasan kebebasan mutlak.

Kita angkat sebuah contoh mengenai seorang pemuda yang sedang dilema antara memilih berpoligami untuk mendapatkan keturunan karena istrinya mandul, atau tetap bersama istrinya karena istrinya akan sangat sedih kalau dia menduakannya. Dalam pandangan Sartre pemuda tersebut memiliki kebebasan penuh untuk memilih keputusannya.

Ketika dipertimbangkan dengan cermat, setiap keputusan yang dibuat oleh seorang anak muda, meskipun dalam kebebasannya, selalu memiliki maksud atau tujuan dari keputusan tersebut. Misalnya, jika seorang pria memilih untuk memiliki banyak istri, tujuannya adalah untuk memiliki anak, dan karena itu istrinya akan mati. Jika dia memutuskan untuk tidak memiliki banyak istri, tujuannya adalah untuk bersama



istrinya, dan inilah mengapa dia tidak akan bahagia jika pria itu berselingkuh. Dari contoh di atas terlihat bahwa konsep kebebasan mutlak lemah karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat.

Eksistensialis, dengan pengetahuan dan kebebasannya, dapat memutuskan tindakan apa yang harus dipilih, tetapi pilihan apa pun terkait erat dengan citra manusia seutuhnya. Dengan kata lain, memilih untuk diri sendiri berarti orang memilih untuk orang lain,<sup>16</sup> karena dampak dari tindakan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi semua orang.

Pilihan satu atau yang lain menegaskan poin-poin penting bahwa apa pun yang dipilih dan dilakukan, meskipun berdasarkan kebebasan, orang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka, dan tanggung jawab itu tidak hanya mencakup individu, tetapi juga tanggung jawab untuk semua orang.

Hal ini mendorong orang untuk selalu berpikir matang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dengan mensimulasikan proses berpikir bertanya pada dirinya sendiri keputusan apa yang akan diambil orang lain dalam situasinya. Oleh karena itu, apa pun yang dipilih harus menjadi pilihan terbaik dari semua kemungkinan yang ada, dan itu harus menjadi pilihan terbaik untuk semua orang, bukan hanya orang yang membuat pilihan. Sudut pandang humanis dalam situasi ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk rasional yang dapat menimbang beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan.

Selain kelebihanannya, ide ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Manfaatnya telah disebutkan, seperti memotivasi orang untuk selalu memikirkan segala sesuatunya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka adalah pembuat undang-undang yang membuat pilihan atas nama semua orang. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan harus menjadi pilihan yang terbaik—tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk semua orang.

---

<sup>16</sup> Save Dagan, M, *Filsafat Eksistensialisme*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 19

Selanjutnya, konsep ini pun memiliki kelemahan, yaitu sebaik apa pun keputusan yang diambil, karena tidak ada nilai atau norma yang mengarahkan, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa keputusan tersebut memang benar-benar keputusan yang terbaik untuk semua orang. Bagaimana individu bisa menjadi legislator yang memutuskan pilihan terbaik bagi semua manusia kalau tidak ada petunjuk bahwa yang baik adalah yang demikian dan yang buruk adalah yang demikian.

## **2. Hukum Islam Sebagai Alat Kontrol Kebebasan Eksistensi Manusia**

Manusia dilahirkan di dunia tanpa adanya campur tangan dari dirinya sedikit pun. Keberadaannya sudah ditentukan dan mau tidak mau manusia harus menerima keadaan dirinya apa adanya. Adanya manusia, jika di dalam Islam, maka itu adalah ciptaan Allah, akan tetapi adanya manusia bagi Sartre bukan ciptaan Allah, karena jika diciptakan maka di dalam diri manusia sudah terdapat watak atau esensi, sedangkan Sartre sangat menolak adanya esensi pada manusia selama manusia masih sebagai eksisten. Keberadaan manusia terlempar di dunia ini tanpa dirinya sendiri menghendaki demikian. Bagi Sartre, asas pertama yang berlaku bagi manusia adalah “ada”, sehingga Sartre mengatakan bahwa tidak ada watak atau sifat yang merupakan esensi pada manusia, dengan demikian manusia adalah makhluk yang belum selesai. Manusia masih harus merealisasikan adanya dengan kebebasannya untuk menentukan esensi dirinya, yaitu dengan bereksistensi.

Sartre memosisikan manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bertanggung jawab atas hidupnya, oleh karenanya manusia memiliki kebebasan absolut untuk berbuat apa pun. Hukum Islam tidak memungkiri adanya kebebasan pada manusia, akan tetapi kebebasan itu bukanlah kebebasan yang sifatnya absolut sehingga mengingkari adanya perintah maupun larangan yang dianggap dapat merampas kebebasan manusia satu sama lain.

Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan individu memiliki efek yang tidak hanya berlaku bagi pribadinya melainkan juga bagi orang disekitarnya, karena itu manusia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindakan yang dilakukannya.

Manusia adalah makhluk yang bebas dan asalnya bebas, dan pada waktu yang

bersamaan dalam merealisasikan kebebasannya tersebut, manusia seringkali mengalami konflik yang dalam pengertian umum diartikan sebagai ketidaksepahaman antar kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan<sup>17</sup>, dikarenakan dorongan atau sebab-sebab seseorang dalam bertindak itu berbeda-beda. Itu dapat kita lihat dalam sejarah manusia mulai dari fase komunal primitif, hingga pada masa manusia modern sekarang ini.

Akibatnya, dalam konteks politik atau manusia modern, kedudukan seseorang dalam strata sosial menjadi faktor manusia yang paling penting dalam bertindak. Hal ini dikarenakan manusia dari masa feodal hingga era demokrasi saat ini tidak lepas dari kekuasaan atas posisinya dalam strata sosial, yang sangat mempengaruhi mereka dalam keberadaan atau tindakannya. akibatnya, kadang-kadang terjadi bentrokan di antara mereka.

Sejalan dengah hal diatas, salah satu filsuf Perancis juga pernah mempertanyakan masalah-masalah fundamental tersebut dalam salah satu bukunya yang berjudul kontrak sosial, Rousseau mengemukakan “Dimanakah kita akan menemukan suatu bentuk asosiasi untuk membela serta melindungi pribadi dan milik setiap asosiasi dengan seluruh kekuatan bersama, sementara setiap pribadi menyatukan dirinya dengan semua orang hanya akan tunduk pada dirinya sendiri, dan akan tetap bebas seperti keadaan sebelumnya?”<sup>18</sup>. Rousseau menambahkan bahwa jika hak setiap individu tidak dibagi antara satu sama lain dan jika tidak ada pedoman umum untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat maka dalam beberapa kasus setiap individu akan menjadi hakim atas kepentingannya sendiri.<sup>19</sup> Ini akan menormalkan keadaan alami dan membuat tirani sewenang-wenang.

Berangkat dari masalah-masalah fundamental sebagai mana yang kita ulas diatas, maka Islam pada tahun sekitar 101-350H yang di motori para imam mazhab dan murid-muridnya pada masa itu, mulai mengunifikasikan (dikumpulkan) hukum

---

<sup>17</sup> Sukardi, Sukardi. “ISLAM, PLURALITAS DAN KONFLIK”. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (November 9, 2015), h. 1.

<sup>18</sup> Jean Jaques Rousseau, *Kontrak Sosial*, (Jakarta, Erlangga, 1986), h. 14

<sup>19</sup> Jean Jaques Rousseau, *Kontrak Sosial*, h. 15.

---

Islam dan mengkodifikasikan nya.<sup>20</sup> Di Indonesia sendiri hukum Islam diperkirakan masuk pada abad VII atau VIII yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam kerajaan, yang diantaranya ialah kerajaan samudera pasai, kerajaan aceh dan lainnya. Artinya negara yang merupakan perwujudan dari kekuasaan politik mengatur, memberikan kebebasan dengan batasan-batasan yang jelas sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.<sup>21</sup>

Dimasa sekarang dengan adanya hukum Islam yang di normatifkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, seakan menjadi angin sejuk ditengah konflik zaman yang berkepanjangan, yang disebabkan aktualisasi-aktualisasi kebebasan manusia dalam pelbagai macam bentuknya.

Hukum Islam hidup dan mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, sebagaimana prinsip atau kaidah dalam hukum Islam yaitu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh ummat manusia.

Jadi hukum Islam hadir bukan untuk membatasi kebebasan alami manusia, melainkan mengatur agar kebebasan tersebut tidak saling timpah tindih dan menghilangkan kebebasan sebahagian manusia.

#### **D. Penutup**

Bahwa benar manusia adalah makhluk yang mempunyai kesadaran yang juga dengan demikian menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan, akan tetapi bukan kebebasan yang sebagai mana yang di pahami oleh Jean Paul Sartre. Oleh karena aspek kebebasan itu maka Islam pada masa golden age-nya itu kemudian mengunifikasikan Al-Quran dan Hadits kedalam bentuk aturan dan perundang-undangan, hukum Islam hadir agar manusia dalam bereksistensi tidak menghilangkan kebebasan manusia satu dan lainnya.

---

<sup>20</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok: Rajawali Press), h. 42.

<sup>21</sup> Nila Sastrawati, "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN". *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (February 24, 2020), h. 4.

### **Daftar Pustaka**

- Bertens, K, Filsafat Abad Ke XX Prancis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djamil, Fatthurahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Erfan Soebahar, Moh, Manusia Seutuhnya; Suatu Kajian Kritis, Semarang: Bimas Jati, 2000
- Gazalba, Sidi, Sistemika Filsafat, Pengantar Kepada Teori Nilai, Jakarta: Bulan Bintang,
- Hasan, Fuad, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Jakarta Pusat: PT. Dunia Pustaka Jaya,
- Jaques Rousseau, Jean, Kontrak Sosial, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Jean Paul Satre, Eksistensialisme Dan Humanisme, ed. Yudhi Murtanto, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.
- Magnis Suseno, Franz, Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Muri Yusuf, A, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Satre Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Poespoprodjo, W, Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Sanusi, Nur Taufik. "SYARI'AH : ANTARA HUKUM DAN MORAL". Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20, no. 1 (September 13, 2020).
- Sastrawati, Nila, "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN". Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 19, no. 2 (February 24, 2020).
- Save Dagun, M, Filsafat Eksistensialisme, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sopyan, Yayan, Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sukardi, Sukardi. "ISLAM, PLURALITAS DAN KONFLIK". Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (November 9, 2015).
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" Jakarta: Departemen Agama, 2019.
- Yussafina, "Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia", Tesis, Semarang: IAIN Walisongo, 2015